

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah berimplikasi pada desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adanya desentralisasi fiskal agar daerah mampu memenuhi segala kebutuhan. Menurut Arsyad (2010), pembangunan ekonomi daerah adalah proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu daerah, oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat maupun pihak swasta demi meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Arsyad (2010) juga menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang dilakukan sedemikian rupa untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah dan disertai dengan perbaikan sistem institusional.

Pembangunan ekonomi suatu daerah dikatakan berhasil apabila meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan pendapatan

antar penduduk, daerah, dan antar sektor sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada daerah tertentu saja. Namun, semua daerah merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2000), dalam bukunya yang berjudul “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga” menyatakan bahwa berdasarkan beberapa ahli, pembangunan ekonomi seharusnya memiliki tiga nilai

- 1) Ketahanan (*Sustenance*), yaitu pembangunan mampu memenuhi kebutuhan pokok demi menghidupi kehidupannya.
- 2) Harga diri (*Self Esteem*), yaitu pembangunan mampu meningkatkan standar hidup.
- 3) *Freedom from servitude*, yakni pembangunan mampu memberikan kebebasan bagi setiap individu dalam berpikir, berkembang, berperilaku, dan bebas menentukan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Ekonomi regional atau ekonomi wilayah membicarakan kondisi ekonomi suatu region secara keseluruhan bukan individual beserta perbedaan potensi antar wilayah dan strategi wilayah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun region yang dimaksud dapat berupa provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, maupun suatu kelompok negara seperti ASEAN (Dr. Ridwan, 2016). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari adanya keberhasilan perekonomian suatu wilayah dan sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan *value added* atau disebut juga penambahan nilai ekonomi yang berasal dari peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan di suatu wilayah. Peningkatan pendapatan menandakan bahwa adanya balas jasa dari sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki suatu daerah seperti teknologi, tenaga kerja, modal, tanah, bahan baku, dan lain-lain.

Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi regional tidak dapat diartikan bahwa tingkat kemiskinan sudah dapat diatasi. Ketimpangan menurut Arsyad (2010), yakni pertumbuhan ekonomi yang hanya dapat dirasakan sedikit manfaatnya oleh masyarakat miskin dan masih banyak penduduk yang memiliki kondisi ekonomi dibawah standar kebutuhannya. Sementara golongan kaya mampu merasakan sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan kata lain, "*Trickle Down Effect*" atau efek penyerapan ke bawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin tidak terjadi.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi regional, keuntungan lokasi, aglomerasi, dan arus lalu lintas modal merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Menurut Syafrizal (2008), terdapat empat jenis model pertumbuhan ekonomi regional yang membahas tentang faktor-faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Adapun model pertumbuhan ekonomi regional tersebut adalah sebagai berikut :

1) Model Basis Ekspor

Model yang dikembangkan pertama kali oleh Douglas C. North pada tahun 1956. Berdasarkan model ini, faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional adalah permintaan produk regional berupa barang dan jasa yang berasal dari

luar wilayah. Sektor yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan mampu mengekspor produk milik wilayahnya ke wilayah lain disebut sektor basis. Sektor basis yang diekspor akan menimbulkan *multilier effect* pada perekonomian regional sehingga ekonomi tumbuh. Dengan adanya produk ekspor akan merangsang pertumbuhan pada sektor-sektor lainnya, pendapatan daerah meningkat, memperluas lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya ekonomi regional akan tumbuh. Kelemahan dari model ini adalah daerah menjadi bergantung pada kekuatan pasar nasional maupun global.

2) Model *Interregional Income*

Model ini diperkenalkan oleh Harry W. Richardson pada tahun 1978. Model ini merupakan perluasan model sektor basis ekspor yang memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah. Faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi regional menurut model ini adalah kegiatan ekspor dari setiap wilayah dan juga perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah.

3) Model Neo-Klasik

Model yang pertama kali diperkenalkan oleh George H. Bort (1960) ini menyatakan bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional adalah mekanisme pasar. Dalam hal ini penentu pertumbuhan ekonomi regional adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan aktivitas produksi, potensi lokal, perputaran tenaga kerja, dan proses urbanisasi antar wilayah.

4) Model Penyebab Berkumulatif

Model yang dipelopori oleh Nikolas Kaldor ini menginterupsi model neo-klasik yang menyatakan bahwa pemerataan pembangunan daerah dapat dicapai

melalui mekanisme pasar. Model ini didasari oleh adanya peningkatan kesenjangan daerah-daerah sekitar daerah maju dimana kekuatan pasar cenderung memperparah tingkat kesenjangan tersebut. Menurut model ini, hanya program pemerintah yang memiliki peran dalam pemerataan pembangunan antar daerah. Apabila mengandalkan mekanisme pasar, pembangunan yang terus meningkat tidak akan menurunkan tingkat ketimpangan regional.

Pertumbuhan ekonomi regional didasarkan pada kemampuan suatu region dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui permintaan barang dan jasa. Ekonomi regional dikatakan tumbuh apabila suatu region mampu meningkatkan produksi barang dan jasa dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari angka moneter Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Harga konstan tersebut menggambarkan nilai moneter dari jumlah output barang dan jasa dan menghilangkan pengaruh perubahan harga dari waktu ke waktu. PDB dan PDRB atas dasar harga konstan secara eksplisit, mencerminkan perubahan jumlah output barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah (Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, 2008).

2.3 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan pembangunan merupakan masalah dan tantangan yang masih dihadapi oleh suatu daerah khususnya bagi daerah-daerah yang ada di negara berkembang. Ketimpangan atau disparitas distribusi pendapatan akan dapat diperbaiki apabila pertumbuhan

ekonomi mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas sehingga distribusi pendapatan akan merata (Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, 2008).

Ketimpangan menggambarkan kondisi yang kontras antara wilayah satu dengan wilayah lainnya seperti perbedaan kontras terkait terpusatnya konsentrasi kegiatan ekonomi pada daerah tertentu. Perbedaan yang kontras menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan antara daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi dan tidak (Tambunan, 2001). Menurut Todaro (2004), ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat menimbulkan perekonomian menjadi tidak efisien dan melemahkan stabilitas baik ekonomi maupun sosial.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari sisi vertikal maupun horizontal. Adanya ketimpangan pembangunan vertikal dapat dilihat dari perbedaan distribusi pendapatan. Sementara ketimpangan pembangunan secara horizontal, dapat dilihat dari adanya negara maju dan terbelakang (Syafrizal, 2008). Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan vertikal adalah indeks gini. Sementara alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis ketimpangan horizontal adalah Indeks Williamson (Mopangga, 2011). Hal tersebut dikarenakan indeks gini menganalisis kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan basis data jumlah penduduk dan total pengeluaran atau pendapatan dari masyarakat. Sementara pada Indeks Williamson membandingkan tingkat kemakmuran antar wilayah melalui pendekatan produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, basis data analisis Indeks Williamson adalah

PDRB atau PDRB per kapita dan jumlah penduduk dari daerah yang diamati (Mopangga, 2011).

2.4 Faktor Adanya Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan yang berasal dari beberapa peneliti. Menurut Sjafrizal (2012), faktor penyebab utama terjadinya Ketimpangan Pembangunan adalah sebagai berikut.

1) Perbedaan Komposisi Sumber Daya Alam

Komposisi sumber daya alam menjadi faktor produksi dalam kegiatan produksi. Dengan adanya perbedaan tersebut daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang melimpah mampu memproduksi berbagai macam barang kebutuhan dalam jumlah yang banyak dan biaya yang kecil. Atas kepemilikan kandungan sumber daya alam yang melimpah masyarakat di suatu daerah menjadi makmur karena harga-harga barang menjadi lebih murah. Kondisi tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menerus hingga menjadi daerah maju. Sementara daerah yang hanya memiliki sedikit kandungan sumber daya alam, sulit untuk mendapatkan faktor produksi dan akhirnya memproduksi barang-barang dengan biaya yang lebih tinggi dengan jumlah produksi yang lebih kecil. Kondisi tersebut akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Dengan demikian ketimpangan akibat perbedaan yang kontras dari kepemilikan sumber daya alam pun terjadi.

2) Perbedaan Kondisi Kependudukan (Demografis)

Kondisi kependudukan yang baik dan kualitas sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja yang lebih tinggi di suatu daerah dan

selanjutnya akan meningkatkan investasi, yang berimplikasi pada perluasan lapangan pekerjaan dalam daerah. Dengan demikian, perekonomian suatu daerah cepat tumbuh. Faktor penyebab ketimpangan pada kondisi demografis adalah pada distribusi pelayanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, ketimpangan pembangunan disebabkan oleh kesenjangan atas kondisi tingkat kemandirian dan pembangunan sumber daya manusia, tingkah laku, kebiasaan serta kesenjangan atas kondisi etos kerja.

3) Terhambatnya Aliran Barang dan Jasa

Apabila aliran barang dan jasa tidak berjalan dengan baik maka kegiatan berupa perdagangan barang dan jasa serta migrasi akan terhambat. Komoditas yang berlebihan pada suatu daerah menjadi sulit untuk dilakukan perdagangan ke luar daerah yang lebih membutuhkan. Akibatnya asupan kebutuhan berupa barang dan jasa pada daerah yang aliran barang dan jasanya terhambat menjadi daerah terbelakang sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tidak merata.

4) Terpusatnya Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu saja akan menyebabkan ketimpangan pembangunan, dimana wilayah yang menjadi konsentrasi kegiatan ekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah yang bukan menjadi konsentrasi kegiatan ekonomi. Konsentrasi kegiatan ekonomi akan mendatangkan peningkatan permintaan pendapatan dan perluasan lapangan pekerjaan yang akan mendorong proses pembangunan. Terpusatnya kegiatan ekonomi suatu wilayah ini dikarenakan wilayah tersebut

memiliki sumber daya yang melimpah, tanah yang subur, dan fasilitas transportasi yang lengkap.

5) Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Desentralisasi fiskal pada daerah otonom seharusnya berimplikasi pada pemerataan ekonomi. Namun, faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan adalah kucuran dana yang berasal dari investasi. Pihak swasta yang mengutamakan keuntungan lebih memilih berinvestasi pada daerah maju dibanding daerah terbelakang. Keuntungan lokasi berupa aksesibilitas terhadap transportasi dan bahan baku, sumber daya yang melimpah, perbedaan upah buruh, tarif sewa properti, infrastruktur yang baik dan lengkap serta konsentrasi pasar menjadi faktor pihak swasta maupun asing untuk berinvestasi atau tidak pada wilayah tersebut.

Sementara menurut Kuncoro (2006), kesenjangan pembangunan antar wilayah disebabkan oleh faktor sumbangan (*endowment factor*). *Endowment factor* merupakan input berupa tanah, tenaga kerja, modal dan *enterpreneurship* yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menunjang kegiatan produksi. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah lebih makmur daripada daerah yang memiliki faktor sumbangan yang lebih kecil.

2.5 Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah indeks yang menggambarkan tingkat ketimpangan antar daerah akibat adanya disparitas pembangunan ekonomi. Ketimpangan daerah dapat terjadi pada antar wilayah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi maupun antar provinsi dalam suatu negara (Mutaali, 2015). Indeks

ini dikembangkan oleh Jeffrey G. William pada tahun 1965 dalam penelitiannya terkait hubungan ketimpangan regional dan tingkat pembangunan ekonomi antar negara maju dan berkembang.

Bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya Indeks Williamson adalah Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk suatu daerah yang diamati karena dalam Indeks Williamson yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kemakmuran antar golongan (Mopangga, 2011). Perhitungan Indeks Williamson diformulasikan sebagai berikut.

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{Y}}, 0 < I_w < 1$$

Sumber : Mutaali, 2015

Keterangan :

I_w = Indeks Wiliamson

Y_i = PDRB per kapita tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi yang diamati

\bar{Y} = rata-rata PDRB per kapita Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi yang diamati

f_i = jumlah penduduk tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi yang diamati

n = jumlah penduduk total di Provinsi yang diamati

Indeks Williamson memiliki nilai dari 0 sampai dengan 1. Semakin kecil atau semakin mendekati nol angka Indeks Williamson, maka semakin merata pembangunan antar wilayah di suatu daerah. Begitupun sebaliknya, semakin besar angka Indeks Williamson atau semakin mendekati satu, maka semakin terlihat kesenjangan pembangunan antar wilayah di suatu daerah. Berdasarkan (Tambunan, 2003), kriteria Indeks Williamson adalah sebagai berikut.

- a. Jika angka Indeks Williamson 0 s.d. 0,5 maka tingkat ketimpangan rendah
- b. Jika angka Indeks Williamson 0,5 s.d. 1 maka tingkat ketimpangan tinggi

2.6 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen adalah alat analisis yang dikembangkan pertama kali oleh Leo Klassen pada tahun 1965. Tipologi Klassen digunakan untuk memetakan kelompok-kelompok daerah berdasarkan kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang menjadi dasar analisis adalah perbandingan besaran PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Mutaali, 2015).

Menurut Widodo (2006), pemetaan kelompok-kelompok daerah pada Tipologi Klassen diklasifikasikan menjadi empat kriteria yaitu :

- 1) Daerah maju dan tumbuh cepat (*high income and high growth*) merupakan daerah-daerah yang dipetakan dalam kuadran I karena memiliki laju pertumbuhan dan PDRB per kapita yang lebih tinggi daripada rata-rata wilayahnya. Dapat diartikan pula bahwa daerah secara potensial memiliki kinerja ekonomi yang baik dan pangsa pasar yang lebih besar daripada daerah acuan yang lebih luas.
- 2) Daerah maju tetapi tertekan (*high income but low growth*) merupakan kelompok daerah yang berada di Kuadran II dimana kelompok daerah tersebut memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi daripada rata-rata PDRB per kapita di wilayahnya namun laju pertumbuhan ekonomi berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Dapat dikatakan kelompok daerah ini adalah kelompok daerah yang telah jenuh setelah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya.

- 3) Daerah berkembang pesat (*high growth but low income*) merupakan daerah-daerah yang memiliki PDRB per kapita lebih kecil dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada rata-rata wilayahnya. Artinya, kelompok daerah tersebut sedang *booming* meskipun terdapat disparitas pendapatan. Kelompok daerah pada kriteria ini digambarkan pada kuadran III.
- 4) Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan daerah yang perlu menjadi perhatian untuk menyetarakan pembangunan daerah karena memiliki kondisi perekonomian yang buruk. Kelompok daerah ini berada pada kuadran terakhir, yaitu kuadran IV yang memiliki PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata wilayahnya.

Menurut Mutaali (2015), pemetaan kelompok daerah pada kuadran I, II, III, dan IV dalam alat analisis Tipologi Klassen adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Pemetaan Kelompok Daerah berdasarkan Kriteria Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r) \ PDRB per Kapita (Y)	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
	$r_i > r$	<p>Kuadran I Daerah maju dan cepat tumbuh (<i>high Income and high growth</i>)</p>
$r_i < r$	<p>Kuadran II Daerah maju tetapi tertekan (<i>high income but low growth</i>)</p>	<p>Kuadran IV Daerah relatif tertinggal (<i>low growth and low income</i>)</p>

Sumber : Mopangga, 2011

Keterangan :

r_i = laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota i

r = rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi

Y_i = PDRB per kapita Kabupaten/Kota i

Y = rata rata PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi

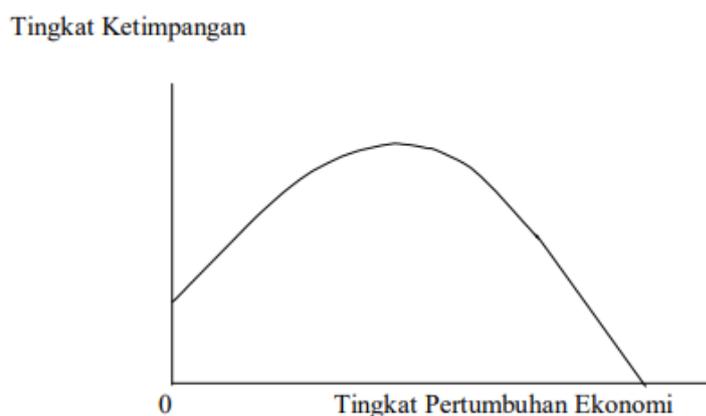
2.7 Hipotesis Kuznet

Hipotesis Kuznet adalah hipotesis yang dibangun oleh Simon Kuznets tahun 1955 pada riset yang dilakukan dengan menggunakan data antar negara (*cross section*) dan data *time series* di negara Inggris, Jerman dan Amerika Serikat sebagai dasar dalam menciptakan hipotesis tersebut (Isnowati, 2007). Kuznet (1995), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan atau korelasi dengan tingkat ketimpangan pembangunan daerah dimana hubungan tersebut membentuk kurva “U terbalik”.

Kurva “U terbalik” memiliki interpretasi bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi biasanya terpusat pada wilayah-wilayah maju akibat adanya industrialisasi sehingga menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Tingkat ketimpangan tersebut akan terus meningkat selama distribusi pendapatan tidak merata, hingga mencapai titik puncaknya (*divergence*). Bila pembangunan berkelanjutan, yakni sektor industri yang memiliki produktivitas tinggi semakin mampu menyerap tenaga kerja di sektor yang memiliki produktivitas rendah, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Akhirnya, setelah mencapai titik puncaknya, ketimpangan antar wilayah semakin mengecil dan semakin menuju pemerataan (*convergence*) (Mopangga, 2011).

Hipotesis Kurva “U terbalik” menggambarkan hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat ketimpangan. Sumbu absis pada kurva “U terbalik” berupa tingkat pertumbuhan ekonomi, sementara sumbu ordinat berupa tingkat ketimpangan pembangunan suatu daerah yang diproksikan dengan besarnya Indeks Williamson. Adapun yang dimaksud ketimpangan pembangunan adalah ketimpangan yang diukur berdasarkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dan membandingkannya dengan distribusi pendapatan antar wilayah (Mopangga, 2011).

Gambar II. 1 Kurva “U Terbalik” (Hipotesis Kuznet)



Sumber : Sri Isnowati

Dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang positif dengan tingkat ketimpangan pembangunan pada jangka pendek, yakni pada awal mula pembangunan. Sementara dalam jangka panjang, tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat ketimpangan pembangunan, yakni ketika tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat akibat meningkatnya produktivitas suatu daerah, maka dalam jangka panjang, tingkat ketimpangan pembangunan mengecil hingga mencapai pemerataan (Todaro, 2004).

Hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan yang dinyatakan dalam Hipotesis Kuznet dapat dibuktikan dengan analisis korelasi pearson (r) dimana tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen (variabel yang memengaruhi) dan tingkat ketimpangan yang diproksi dengan Indeks Williamson sebagai variabel dependen (variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen) (Yuliani, 2015). Berdasarkan Yuliani (2015), Nilai korelasi pearson (r) memiliki rentang dari -1 sampai dengan 1. Adapun kriteria besaran korelasi pearson adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila $r = 0$ atau mendekati 0, itu artinya variabel independen memiliki korelasi atau tidak memiliki korelasi sama sekali dengan variabel yang dipengaruhi (variabel dependen). Dengan kata lain tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi dengan tingkat ketimpangan.
- 2) Apabila $r = +1$ atau mendekati 1, artinya variabel dependen dan independen berkorelasi positif atau berbanding sebanding. Dengan demikian, apabila nilai korelasi pearson menunjukkan hasil tersebut, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka tingkat ketimpangan semakin tinggi pula artinya, semakin terlihatnya ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal.
- 3) Apabila $r = -1$ atau mendekati -1 , maka dua variabel tersebut memiliki korelasi yang negatif atau berlawanan. Itu artinya, apabila tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat ketimpangan akan menurun. Hal tersebut menandakan bahwa hipotesis kuznet berlaku pada daerah yang dianalisis.

Adapun formula untuk menentukan besaran korelasi pearson adalah sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - (\sum_{i=1}^n X_i)(\sum_{i=1}^n Y_i)}{\sqrt{[n \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\sum_{i=1}^n X_i)^2][n \sum_{i=1}^n Y_i^2 - (\sum_{i=1}^n Y_i)^2]}}$$

Sumber : Yuliani, 2015

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien Korelasi Pearson

X_i = Indeks Williamson

Y_i = Pertumbuhan Ekonomi

n = Jumlah Observasi

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan acuan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dan mengetahui perkembangan kondisi objek penelitian. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan alat analisis berupa tipologi klassen, indeks williamson dan korelasi pearson.

Terdapat satu penelitian terdahulu yang menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan antar Provinsi secara nasional dan tiga penelitian terdahulu yang menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2015. *Penelitian pertama* dilakukan oleh Doni Mahardiki dan Rokhedi Priyo Santoso pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia 2006-2011”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan tingkat ketimpangan pendapatan melalui Indeks Williamson dan Indeks Entropi

Theil. Selain itu, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan distribusi pendapatan menggunakan alat analisis *Paired Sample T-Test*, serta mengklasifikasikan pola pertumbuhan setiap daerah dengan Tipologi Klassen. *Perbedaan* dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah dalam penelitian terdahulu ini tidak menguji hipotesis Kuznet dan perbedaan alat analisis dalam mengukur ketimpangan. Pada penelitian terdahulu ini menggunakan Indeks Entropi Theil dan Indeks Williamson sedangkan pada penelitian saat ini hanya difokuskan pada Indeks Williamson.

Hasil penelitian Mahardiki dan Rokhedi (2013) menyatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan indeks williamson, memiliki rata-rata 0,796 yang berarti tingkat ketimpangan tergolong tinggi dan selama periode 2006 hingga 2011 tingkat ketimpangan cenderung meningkat. Sementara tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dari Indeks Theil memiliki rerata 0,3513 dan cenderung naik namun tidak signifikan.

Dalam analisis tipologi klassen, provinsi yang tergolong daerah maju dan cepat tumbuh adalah Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan Papua Barat. Terdapat 14 provinsi yang termasuk daerah maju tapi tertekan diantaranya adalah Provinsi Banten, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Jambi, Gorontalo, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Provinsi Papua, Riau, dan Kalimantan Timur merupakan daerah yang berkembang cepat. Daerah yang tergolong relatif tertinggal terdapat 12 provinsi, diantaranya adalah Provinsi Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Bangka Belitung, NTB, NTT, Kalimantan barat,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku.

Penelitian kedua yang meneliti tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten yakni penelitian yang dilakukan oleh Ketut Wahyu Dhyatmika dan Hastarini Dwi Atmanti dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran” di tahun 2013. Objek penelitiannya berupa kondisi pembangunan di Provinsi Banten pada tahun 2000 sampai 2011. Tujuan penelitian yang dilakukan Wahyu dan Dwi adalah untuk mengetahui kondisi ketimpangan pembangunan melalui indeks williamson dan faktor penyebabnya melalui uji empiris menggunakan analisis data panel. Uji data panel ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penanaman modal asing (PMA), pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran terhadap tingkat ketimpangan. Selain itu, penelitiannya juga menganalisis empat kriteria daerah dengan Tipologi Klassen. Perbedaan penelitian yang dilakukan antara Wahyu dan Dwi dengan penelitian saat ini adalah penelitian yang dilakukan Wahyu dan Dwi tidak menguji keberlakuan hipotesis Kuznet.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dan Dwi (2013) menyatakan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pasca pemekaran hingga tahun 2011 cenderung meningkat berdasarkan uji empiris data panel, yakni hasil regresi dari *Fixed Effect* menyatakan bahwa penanaman modal asing (PMA) memiliki pengaruh yang baik terhadap tingkat ketimpangan pembangunan, *Government expenditure* yang meningkat akan berpengaruh baik terhadap

penurunan tingkat ketimpangan pembangunan, dan tingkat penngangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan.

Pasca pemekaran, awalnya Provinsi Banten terdiri dari dua kota dan empat kabupaten yakni Kota Cilegom, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang. Hasil penggolongan empat kriteria daerah dalam Tipologi Klassen di Provinsi Banten tahun 2000–2011 yakni bahwa Kota Cilegon dan Kota Tangerang termasuk daerah maju dan cepat tumbuh. Sementara Kabupaten Tangerang termasuk daerah yang berkembang pesat. Kemudian Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang termasuk daerah tertinggal. Kabupaten/kota yang tergolong dalam daerah maju namun tertekan tidak ada.

Selanjutnya penelitian terdahulu ketiga, dilakukan oleh Trias Dewi Yunisti pada tahun 2012, yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten”. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Yunisti (2012) adalah untuk menggambarkan ketimpangan pembangunan manusia dari segi ekonomi dan segi sosial. Dari segi ekonomi, basis data analisis yang digunakan berupa PDRB Per Kapita sedangkan basis data analisis dari segi sosial adalah pada bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Banten. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui variabel yang memiliki tingkat ketimpangan yang paling tinggi diantara variabel pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan serta mengetahui korelasi antar variabel tersebut. Letak Perbedaan analisis antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dengan penelitian terkini adalah pada objek yang diukur tingkat ketimpangannya. Penelitian terdahulu menganalisis tingkat ketimpangan sosial yang menggunakan variabel pendapatan, pendidikan,

kesehatan, dan kemiskinan. Sementara penelitian terkini menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan dari segi ekonomi antar daerah di Provinsi Banten menggunakan variabel pendapatan per kapita.

Hasil penelitian Yunisti (2012) menyatakan bahwa Tingkat ketimpangan di Provinsi Banten dari tahun 2002 hingga 2010 membaik, artinya tingkat ketimpangan yang dilihat dari indeks theil cenderung semakin menurun. Sementara, tingkat ketimpangan dari segi sosial yang dianalisis melalui indeks williamson dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel analisisnya, cenderung mengalami penurunan indeks. Bidang pendidikan memiliki tingkat ketimpangan yang paling tinggi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) memiliki hubungan yang paling kuat dengan ketimpangan indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD). Selain itu dapat diketahui juga bahwa Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon sejak tahun 2000–2010 memiliki indeks Rata-Rata Lama Sekolah lebih besar daripada tingkat RLS Provinsi Banten secara keseluruhan. Begitu juga Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 – 2010 indeks RLS juga lebih besar dibandingkan indeks RLS di Provinsi Banten.

Penelitian terdahulu keempat yang meneliti tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Banten juga adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri Ramadhani Utami pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Potensi Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2011–2015”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk

mengetahui sektor-sektor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, mengelompokkan kondisi pertumbuhan ekonomi melalui Tipologi Klassen, mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota, dan mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menurut hipotesis Kuznet di Provinsi Banten pada tahun 2011–2015.

Secara umum penelitian ini memiliki metode dan analisis yang sama dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Namun perbedaannya terletak pada rentang waktu yang berbeda dan tidak menganalisis sektor-sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi melalui Location Quotient. Penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri, 2018 dimana penelitian saat ini memasukkan variabel kasus dan dampak Pandemi Covid-19 yang memengaruhi perekonomian di Provinsi Banten khususnya pada tahun 2020.

Hasil Penelitian yang dilakukan Utami (2018) adalah bahwa Berdasarkan analisis Locatin Quotient, sektor basis atau sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dominannya adalah sektor jasa pendidikan dimana sektor ini menjadi sektor basis di lima kabupaten/kota yakni di Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Tangsel. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor basis di empat kabupaten yakni, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, dan Kab. Serang. Sektor industri pengolahan menjadi sektor basis di empat kabupaten/kota yakni, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon.

Sementara hasil analisis Tipologi Kassen di Provinsi Banten tahun 2011 – 2015, menyatakan bahwa daerah yang tergolong daerah maju dan tumbuh cepat adalah Kota Tangerang. Selanjutnya, yang termasuk daerah maju tapi tertekan adalah Kota Cilegon. Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan termasuk daerah berkembang cepat. Terakhir, kabupaten/kota yang tergolong relatif tertinggal diantaranya adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang.

Tingkat ketimpangan yang diukur melalui indeks williamson menunjukkan hasil yang buruk dimana pada tahun 2011, besar indeks williamson adalah sebesar 0,7667. Angka tersebut menyatakan bahwa ketimpangan daerah tergolong tinggi. Pada tahun 2015, indeks williamson atau tingkat ketimpangan meningkat hingga mencapai 0,7774.

Hasil analisis korelasi pearson menunjukkan nilai korelasi yang negatif, yakni -0,78364, artinya tingkat ketimpangan berbanding terbalik terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat ketimpangan akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Hipotesis Kuznet berlaku di Provinsi Banten.